

PENGUATAN PERAN *TRIPLE HELIX* DALAM PARIWISATA SEGITIGA EMAS DI PULAU GILI LABAK MADURA

Enza Resdiana¹

Tita Tanjung Sari²

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja, Sumenep

²Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Wiraraja, Sumenep

[1enza.resdiana@gmail.com](mailto:enza.resdiana@gmail.com)

Abstract

The Triple Helix concept in tourism development is a concept that combines several tourism actors / actors to get together in tourism development. A good collaboration by dividing the roles between the Government, the private sector and the community will bring great changes to the development of the tourism island of Gili Labak, Su-menep Regency. The purpose of this study is to determine the strengthening of the roles classified as Triple Helix (The Role of Government, Private and Community) in the Golden Triangle tourism in the Gili Labak islands of Sumenep Regency. The research method used is descriptive qualitative. The data used consists of primary data and secondary data. Data collection techniques used through interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the Strengthening of the Triple Helix Role in the golden triangle on Gili Labak Island is not yet optimal and there has not been any collaboration between development and tourism development actors such as between the Government and the private sector that runs each in tourism development, even though the community has involved in every development process that is carried out but the gradual and consistent development is needed and the need for integrated and coordinated cooperation between tourism development actors so that tourism development will be successful.

Keywords: *role of triple helix (Government, Private, Community), tourism development*

Abstrak

Konsep Triple Helix dalam pengembangan pariwisata merupakan konsep yang memadukan beberapa pelaku/aktor wisata untuk bersama-sama dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi yang baik dengan membagi peran antara Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat akan membawa perubahan yang besar untuk perkembangan pariwisata pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penguatan peran yang tergolong dalam Triple Helix (Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam pariwisata Segitiga Emas di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan Peran Triple Helix dalam segitiga emas di Pulau Gili Labak masih belum optimal dan belum terjalin kerjasama antar aktor pembangunan dan pengembangan wisata seperti antara Pemerintah dan swasta yang berjalan masing-masing dalam pengembangan wisata, meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan akan tetapi dibutuhkan pembangunan yang bertahap dan konsisten serta dibutuhkannya kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antar aktor pembangunan wisata sehingga pembangunan wisata akan berhasil

Kata Kunci : *peran triple helix (pemerintah, swasta, masyarakat), pengembangan wisata*

PENDAHULUAN

Pulau Gili Labak mempunyai pesona alam terpendam di dalamnya yang mampu menarik wisatawan. Bentangan pasir putih dan lautan biru dengan ombak yang landai menjadikan Pulau Gili Labak ini sangat layak untuk dikunjungi. Pasir putih Pulau Gili Labak mempunyai daya tarik yang sangat unik yaitu pesona keindahan biota laut yang sangat beragam, sehingga dapat memuaskan para pecinta *snorkling* ataupun *diving*. Selain itu, hamparan pasir putih bersih yang dipadukan dengan pepohonan di sekitar tepi pantai, desiran ombak yang tenang, warna-warni keberagaman ikan lautnya dan hamparan terumbu karang dapat menjadikan daya tarik tersendiri dari pulau tersebut. Keindahan Pulau Gili Labak sangat layak untuk dipromosikan ke mancanegara agar potensi wisata yang berada di Indonesia dapat dipandang oleh negara lain.

Berdasarkan sumber dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Pulau Gili Labak menempati urutan pertama dengan jumlah pengunjung terbanyak selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai akhir 2016. Pengunjung Pulau Gili Labak mencapai 66.256 jiwa. Eksistensi Pulau Gili Labak sudah mulai terlihat di tahun 2014, Pulau Gili Labak telah menjadi primadona di Kabupaten Sumenep, karena banyak

wisatawan nusantara yang berkunjung ke pulau ini, kendati obyek wisata Gili Labak tergolong baru dibanding destinasi wisata lainnya di Kabupaten Sumenep. Tidak sedikit juga wisatawan mancanegara yang juga mengenal dan berkunjung ke pulau yang memiliki gugusan terumbu karang yang beraneka ragam ini.

Permasalahan tempat wisata ini adalah dalam hal pelayanan fasilitasnya. Kualitas pelayanan fasilitas di Pulau Gili Labak masih sangat minim. Di area tersebut terbatasnya sumber air tawar, sehingga kebutuhan air bersih masih sangat terbatas. Selain itu listrik juga hanya nyala pada malam hari saja, di Pulau Gili Labak juga belum ada penginapan. Serta terkait pelayanan transportasi laut menuju ke area wisata juga masih tergolong kurang baik. Karena menggunakan perahu kecil milik masyarakat sekitar sehingga keselamatan untuk para wisatawan belum terjamin. Masih ditemukannya kecelakaan kecil yang terjadi pada wisatawan, terdapat kejadian para wisatawan nyaris terseret ombak akibat mesin perahu mati dan tidak dapat diperbaiki. Hal ini menjadi permasalahan serius dan penting yang harus segera diberikan solusinya. Salah satu tugas bagi pemerintah setempat adalah dapat memberikan dan membenahi pelayanan fasilitas disekitar pulau Gili Labak karena pelayanan fasilitas

disana masih sangat minim. Pemerintah melalui birokrasinya memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Masalah pelayanan publik mempunyai peranan sangat besar karena menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan tupoksinya, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep yang berkewajiban membenahi permasalahan tersebut, akan tetapi bukan hanya kewajiban dari pemerintah saja untuk bisa mengembangkan pariwisata pulau Gili Labak. Melainkan tugas dari beberapa pelaku wisata lainnya yakni swasta, kelompok sadar wisata (pokdarwis), Masyarakat dan pihak lainnya. Peran dari mereka sangat diperlukan, karena kerjasama yang baik dari para pelaku wisata akan memberikan dampak yang positif terutama dalam pengembangan pariwisata pulau Gili Labak.

Peran dari pelaku wisata disini seperti pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan untuk bisa mengembangkan pariwisata di pulau Gili Labak melalui penyediaan berbagai fasilitas-fasilitas akomodasi seperti tempat penginapan, kebutuhan air bersih, transportasi laut dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Karena sejauh ini pelayanan fasilitas masih minim terutama dalam hal pelayanan transportasi

laut menuju pulau Gili Labak. Para wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut masih menggunakan perahu kecil milik nelayan sekitar yang kualitas keselamatannya masih sangat kurang. Kurangnya fasilitas layanan di Gili Labak akan membuat potensi besar yang dimiliki oleh obyek wisata ini menjadi mubazir dan tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya yang maksimal (Rosita, 2017).

Konsep Triple Helix dalam pengembangan pariwisata merupakan konsep yang memadukan beberapa pelaku/aktor wisata untuk bersama-sama dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi yang baik dengan membagi peran antara Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat akan membawa perubahan yang besar untuk perkembangan pariwisata disuatu daerah, hal ini disebabkan tiap-tiap aktor yang ikut dalam andil dalam perkembangan pariwisata akan secara maksimal memberikan peran dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sulistiyani (2017:97-99) yang menyatakan bahwa peran dari setiap aktor yang tergolong dalam Konsep Triple Helix yaitu peran pemerintah, peran swasta dan peran masyarakat dapat menyukkseskan

pembangunan. Tentu saja hal ini harus dilandasi dengan kerjasama yang serius dengan perencanaan yang matang sehingga pengembangan yang akan dilakukan akan berhasil.

Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak , agar pariwisata di Pulau Gili Labak terjaga dengan baik, pariwisata Pulau Gili Labak juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Serta untuk kenyamanan para pengunjung yang ingin menikmati wisata di Pulau Gili Labak. Maka dari itu, diperlukannya pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak, apabila banyak para wisatawan yang hadir di Pulau Gili Labak tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut dan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan apabila berkunjung ke Pulau Gili Labak. Maka dari itu, diperlukannya kolaborasi peran atau penguatan peran yang baik dari para pelaku wisata yakni Pemerintah, Swasta, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Masyarakat dan pihak lainnya untuk bisa bekerja sama mengembangkan pariwisata Pulau Gili Labak menjadi tempat wisata yang banyak diminati oleh masyarakat, sekaligus memberikan rasa nyaman kepada pengunjung Pulau Gili Labak .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dilingkungan tersebut. Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sehingga dalam hal ini pelaku wisata seperti Pemerintah, Swasta, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Masyarakat dan pihak lainnya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti kumpulkan sesuai dengan yang terdiri dari data primer melalui hasil wawancara mendalam dengan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat Gili Labak dan observasi langsung Serta pengumpulan data diperoleh dari hasil dokumentasi dan kepustakaan (data sekunder).

Terakhir teknik analisa data, yang dilakukan peneliti Bogdan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), yaitu pertama, reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan data dari semua data yang diperoleh. Kedua, penyajian data dilakukan dengan proses pengorganisasian untuk memudahkan data dianalisis dan disimpulkan. Ketiga, penarikan kesimpulan,

yaitu membuat pernyataan atau kesimpulan secara bulat tentang suatu permasalahan yang diteliti dalam bahasa yang deskriptif dan bersifat interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Triple Helix merupakan konsep pengembang pariwisata yang melibatkan tiga aktor penting dalam pengembangan yang akan dilakukan, aktor penting tersebut yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling kerjasama dalam pengembangan pariwisata khususnya wisata Gili Labak. Tiga aktor ini memiliki peran masing-masing yang secara signifikan dapat membangun dan mengembangkan wisata. Dalam hal ini peneliti melakukan studi lapangan pada wisata pulau Gili Labak, melakukan wawancara dengan mengacu pada beberapa informan terkait dengan pengembangan wisata selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap situasi diwisata pulau Gili Labak.

Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor penting dalam pengembangan pariwisata, oleh sebab itu pemerintah diharapkan mampu menjembatani antara pihak swasta dan masyarakat untuk saling bersinergi memberikan dukungan hal positif untuk pengembangan wisata. Dalam hal ini

pemerintah berperan sebagai regulator untuk menciptakan dan membatasi kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengembangan wisata, dibutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai pihak-pihak yang lain seperti dukungan dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah untuk mendukung program pengembangan yang akan dilakukan. Dibutuhkan sistem yang mengatur untuk menciptakan wisata yang baru, sehingga dengan hal ini dibutuhkannya kebijakan yang mengatur mengenai pengembangan wisata khususnya untuk mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata yang akan dibangun dan dikembangkan. Pemerintah sebagai pembuat keputusan harus memiliki rambu-rambu kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut (<http://digilib.unila.ac.id/3058/15/BAB%20I.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018)

:

- a) Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata, dalam hal ini pemerintah daerah telah melakukan perencanaan tata ruang kawasan wisata Gili Labak hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan antar Organisasi Pemerintah Daerah untuk ikut mendukung pengembangan wisata ini,

seperti yang terlihat banyak bantuan yang diberikan oleh OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, PU Cipta Karya yang ikut serta dalam pengembangan wisata Kabupaten Sumenep selain itu juga melibatkan pihak swasta seperti BPRS, Santos Madura Off. Shore dan masyarakat juga terlibat dalam partisipasi dalam mendukung pariwisata tersebut. Dengan hal tersebut maka pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perencanaan tata ruang wisata hanya saja wisatawan yang ingin ke pulau Gili Labak masih bingung dengan penetapan dermaga, pemerintah daerah masih belum menetapkan Dermaga tertentu yang dapat dilalui sebelum berkunjung ke Gili Labak.

b) Meningkatkan aksesibilitas merupakan bagian penting dari adanya pengembangan wisata Gili Labak, dalam observasi yang dilakukan aksesibilitas ke Pulau Gili Labak masih kurang memadai hal ini dikarenakan dermaga yang ada masih belum maksimal menyediakan transportasi ke Pulau Gili Labak, untuk mengunjungi ke wisata Gili Labak saja

kita harus memesan perahu terlebih dahulu karena memang tidak ada dermaga yang khusus transportasi Gili Labak, masih kurangnya akses ini menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan, untuk tahun 2018 memang ada beberapa paket wisata yang menawarkan untuk pergi ke Gili Labak hal ini karena memang berkaitan dengan Program Pemerintah Daerah sehingga para pemilik perahu atau transportasi laut menawarkan paket wisata akan tetapi untuk melihat perkembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat pada tahun 2019 yang memang wisatawan kesulitan dalam menemukan paket wisata ke Gili Labak karena memang pihak-pihak penyedia perahu yang dulu sudah berhenti jadi untuk pergi ke Gili Labak harus memesan perahu jauh hari sebelum keberangkatan.

c) Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komonikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah telah mampu memberikan fasilitas standar seperti dibangunnya fasilitas puskesmas pembantu dengan adanya cek up gratis, untuk kebersihan sendiri Pemerintah Daerah menggandeng Dinas

lingkungan hidup dalam menyediakan tempat sampah dan cara mengelola sampah plastik, dan untuk keamanan dalam transportasi laut masih belum adanya keamanan yang memadai sehingga untuk perjalanan ke wisata Gili Labak masih minim fasilitas keamanannya hal ini juga yang menyebabkan jumlah wisatawan semakin berkurang.

- d) Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Untuk fasilitas penunjang lainnya, swasta mungkin berperan dalam melengkapi fasilitas wisata Gili Labak seperti bantuan kursi, panggung, Gazebo dan sebagainya akan tetapi untuk pembangunan fasilitas seperti perahu yang beroperasi setiap saat masih belum adanya kerjasama dengan pihak swasta oleh sebab itu pemerintah masih belum mampu untuk menarik investor.

Pada dasarnya dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata faktor kunci untuk kesuksesan pengembangan wisata terletak pada Pemerintah selaku regulator dalam pembangunan ini. Dibutuhkan komitmen dari pemerintah untuk melakukan perencanaan yang matang yang melibatkan banyak pihak untuk saling bekerjasama

dalam membangun pariwisata pulau Gili Labak. Organisasi Pemerintah Daerah dituntut untuk mendukung dalam melaksanakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.

Peran utama dari Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan wisata Gili Labak dimulai dengan membangun sarana dan prasarana wisata Gili Labak sehingga dengan dibangunnya sarana dan prasarana wisata akan membantu investor untuk ikut bekerjasama dalam membangun wisata Gili Labak. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Yoeti (2016:77) yang menyatakan peran pemerintah sebagai regulator atau sebagai pembuat kebijakan dapat secara langsung membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dengan bekerja sama dengan swasta serta pelibatan masyarakat daerah tersebut sehingga memiliki dampak baik untuk mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja proyek-proyek yang akan dibangun seperti : pembuatan jalan menuju obyek wisata, jembatan, pembangkit tenaga listrik, penyediaan air bersih, pembangunan tempat-tempat rekreasi, objek wisata, angkutan wisata, terminal dan lapangan udara, hotel, restoran, biro perjalanan, *souvenir shop*.

Pemerintah Daerah telah membangun sarana dan prasarana terminal dan lapangan

udara serta perlengkapan hotel dan biro perjalanan untuk menuju ke objek wisata di Kabupaten Sumenep, akan tetapi untuk wisata Gili Labak karena wisata tersebut menggunakan jalur laut sulit untuk dijangkau karena keterbatasan perahu yang tidak setiap hari beroperasi ke pulau tersebut selain itu keamanan dijalur laut masih belum adanya kepastian keamanan karena minimnya perlengkapan jalur laut. Sedangkan untuk menyediakan air bersih telah disiapkan tandon air tawar yang disediakan oleh dinas terkait, untuk hotel dan penginapan masyarakat telah menyiapkan rumah dengan menyediakan makanan dan minuman khas Pulau Gili Labak. Untuk penyediaan souvenir khas pulau Gili Labak masih belum adanya toko yang menyediakan tersebut sehingga untuk mendapatkan souvenir dari wisata ini masih belum ada karena minimnya pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat disana terutama dalam menjamu wisatawan.

Peran Swasta

Swasta memiliki peran untuk ikut dalam pembangunan dan pengembangan wisata yang akan dicanangkan oleh Pemerintah, pihak swasta berperan membantu penyediaan fasilitas yang tidak bisa dijangkau atau disediakan oleh Pemerintah. Swasta dapat memberikan investasi pembangunan wisata, yang menjadi

dasar Pihak swasta memberikan investasi terhadap pembangunan dan pengembangan wisata yaitu faktor untung rugi dalam memberikan investasi tersebut sehingga apabila peluang pembangunan yang dilihat dapat memberikan keuntungan maka pihak swasta akan memberikan investasi untuk pengembangan wisata tersebut begitupun sebaliknya jika yang dilihat sebuah kerugian maka pihak swasta tidak akan memberikan investasi pembangunan. Sementara yang ikut serta dalam melengkapi fasilitas wisata Gili Labak berdasarkan observasi yang ada hanyalah Pihak Santos, dengan memberikan bantuan fasilitas wisata seperti Gazebo, Kursi malas, sound, kursi karet, tikar, panggung acara, dan energi tenaga surya/sinar matahari. Bentuk bantuan ini sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Santos Madura Off. Shore dalam mendukung program Pemerintah. Bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk CSR dari Santos. Pembangunan icon Pulau Gili Labak dibangun oleh BPRS Sumenep sebagai bentuk dukungan adanya pengembangan wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dengan menunjuk pemahaman yang jelas terkait dengan peran keduanya sehingga dengan memahami peran dari masing-masing maka akan dapat

mensukseskan pembangunan dan pengembangan wisata Gili Labak, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta. Sementara untuk pembangunan dan pengembangan wisata Gili Labak, Pemerintah melakukan pembangunan dengan melibatkan Organisasi Pemerintah yang lain tanpa bisa menarik perhatian dari swasta, sementara itu pihak swasta pun keikutsertaan dalam program pengembangan wisata hanya berupa dukungan saja tanpa investasi yang berkelanjutan. Menurut Pitana dan Diarta (2009:113) Untuk mencapai kesuksesan dalam membangun pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biayabilitas ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Disisi lain pebisnis yang terlebih terfokus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa hanya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah.

Pelaku bisnis kurang berpartisipasi dalam pengembangan wisata Gili Labak,

beberapa hal yang masih belum ditetapkan oleh Pemerintah membuat pihak swasta sulit untuk masuk dalam pengembangan wisata Gili Labak contohnya saja seperti penentuan dermaga untuk jalur laut dan penyediaan perahu untuk wisatawan yang masih belum koordinasi dengan baik sebab perahu tidak beroperasi tiap hari jadi wisatawan harus booking sebelum pergi ke pulau Gili Labak, dengan belum terkoordinasi maka menyebabkan pihak biro perjalanan yang membawa wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Gili Labak kesulitan dalam menentukan perahu, selain itu ada beberapa Dermaga seperti Dermaga di Talango, Dermaga Kalianget dan Dermaga di Pulau Giligenting membuat wisatawan bingung mau pakai saja yang mana.

Meskipun pulau Gili Labak memiliki pesona alam yang indah akan tetapi kendala pada transportasi laut maka wisata tersebut tidak akan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah begitu pula Pihak swasta juga tidak berani untuk memberikan investasi pembangunan dan pengembangan wisata Gili Labak karena dari pihak swasta telah dapat memprediksi perkembangan wisata Gili Labak tidak akan bertahan dengan lama. Berdasarkan observasi yang dilakukan memang wisata Gili Labak banyak pengunjung ditahun 2018

pada saat gencar-gencarnya dilakukan promosi, sedangkan setelah itu wisata ini sepi pengunjung banyak perahu yang lebih mencari ikan daripada memuat wisatawan yang datang.

Meskipun pada dasarnya peran swasta menyediakan fasilitas dan kebutuhan pengunjung tetapi kalau melihat kondisi yang kurang menguntungkan maka pihak swasta akan mundur dari peran tersebut seperti halnya di tahun 2017-2018 ada pihak swasta yang menyediakan souvenir baju Gili Labak yang mendirikan toko di wisata Gili Labak kemudian karena kunjungan wisata yang semakin menurun dan daya beli wisatawan yang rendah menyebabkan toko souvenir ini tutup dan meninggalkan wisata Gili Labak hal ini berarti keuntungan yang didapatkan sangat rendah sehingga pihak swasta

memutuskan untuk gulung tikar. Dengan kejadian tersebut maka peran swasta dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan pengunjung menjadi belum maksimal dijalankan meskipun secara teorinya peran swasta sangat dibutuhkan untuk membuat wisata Gili Labak menjadi wisata yang terkenal dengan banyak pengunjung.

Dalam teorinya, Yoeti (2016:12-13) menjelaskan bahwa peran swasta adalah membantu pelayanan bagi wisatawan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh swasta untuk menunjang kebutuhan dari wisatawan, pelayanan kebutuhan yang dibutuhkan dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Pelayanan Kebutuhan Wisatawan

Jenis Perusahaan	Produk Yang Dihasilkan
<i>Travel agent</i>	Informasi paket wisata
Perusahaan penerbangan	<i>Seats</i> dan pelayanan lainnya
Angkutan pariwisata	Pelayanan transfer ke hotel, tujuan wisata
Akomodasi hotel	Kamar dan pelayanan lainnya
Restoran dan sejenisnya	Makanan dan minuman
Impresariat, amusement	<i>Entertainment</i> dan atraksi wisata
<i>Local tour operator</i>	City tour

<i>Shopping center</i>	Cendramata dan oleh-oleh
<i>Bank</i>	Penukaran dan pengambilan uang
<i>Retail stores</i>	Bermacam-macam keperluan perjalanan

Untuk kebutuhan seperti *travel agent*, perusahaan penerbangan, akomodasi hotel, restoran, bank, *shopping center* dan kebutuhan pengunjung terpenuhi di daratan sedangkan untuk wisata kepulauan masih sangat minim kebutuhan dari pengunjung atau wisatawan yang datang, pihak swasta telah mampu untuk melakukan promosi tour untuk kunjungan ke pulau Gili Labak akan tetapi terkendala dengan perjalanan transportasi laut dan minimnya pemenuhan kebutuhan di pulau Gili Labak, sehingga kadang kala wisatawan sendiri yang membatalkan untuk pergi ke Pulau Gili Labak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Pemerintah berkomitmen dengan pengembangan wisata yang ada maka pihak swastapun akan ikut berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah dan peran dari setiap aktor yang terlibat akan dipahami dan dilaksanakan dengan maksimal mungkin.

Peran Masyarakat

Pulau Gili Labak memiliki pesona alam yang indah, dengan pesona ini Gili

Labak menjadi daya tarik untuk wisata pantai yang indah, selain itu, masyarakatnya terbuka terhadap perkembangan wisata, oleh sebab itu berdasarkan dengan potensi yang ada wisata Gili Labak telah memenuhi syarat dalam pengembangan wisata seperti yang dinyatakan oleh Yoeti (2001 : 177), hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

Pertama, Daerah itu harus mempunyai "*something to see*", yaitu harus mempunyai obyek wisata dan atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Wisata Gili Labak memiliki pantai yang indah dan bawah laut yang memukau yang dapat menarik perhatian wisatawan dimana keindahan ini tidak dimiliki oleh daerah lain, pasir yang putih dan air yang jernih merupakan daya tarik dari wisata Gili Labak, hanya saja dibutuhkan peran masyarakat untuk membuat pulau Gili Labak memiliki atraksi wisata yang unik khas wisata pulau dengan atraksi atau

kegiatan semacam ini akan menambah perhatian dari wisatawan, memiliki masyarakat yang terbuka merupakan hal yang positif untuk dilakukannya pengembangan wisata hanya dibutuhkan beberapa pendampingan dari Pemerintah supaya masyarakat mampu untuk mengelola wisata tersebut menjadi wisata yang unggul, dengan dibentuknya Pokdarwis selaku kelompok pemuda yang mampu untuk membuat wisata Gili Labak menjadi wisata yang menarik.

Kedua, Di daerah tersebut harus mempunyai “*something to do*,” di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, dan harus banyak disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah di tempat itu. Untuk syarat yang kedua Pemerintah Daerah, bersama swasta dan masyarakat (Pokdarwis) berusaha untuk mengembangkan wisata Gili Labak menjadi wisata yang memiliki fasilitas yang lengkap meskipun pada dasarnya telah tersedianya kebutuhan yang disediakan oleh masyarakat disana seperti kebutuhan penginapan yang disediakan oleh masyarakat setempat, penyediaan makanan dan minuman ciri khas Pulau Gili Labak meskipun penyediaan makanan dan minuman ini hanya sebatas menyediakan warung tentunya untuk wisatawan mancanegara belum cocok untuk diberikan fasilitas seperti ini akan tetapi ada

usaha kemandirian dari masyarakat untuk menyediakan beberapa fasilitas. Sedangkan untuk atraksi atau kegiatan yang dilaksanakan tentunya dibutuhkan peran Pemerintah untuk ikut serta memberikan andil dalam menciptakan kegiatan atau atraksi wisata.

Ketiga, Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan “*something to buy*”, di tempat tersebut harus tersedia souvenir dan kerajinan rakyat sebagian oleh-oleh atau souvenir untuk dibawa pulang ketempat asal masing-masing. Selain itu juga harus ada sarana-sarana lain, seperti money charger, bank, kantor pos, kantor telpon, dan lain sebagainya. Untuk penyediaan souvenir dan kerajinan masyarakat Gili Labak masih belum ada kemandirian masyarakat yang seperti itu, meskipun dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melibatkan pokdarwis tetapi usaha tersebut masih belum mampu untuk memandirikan masyarakat Gili Labak untuk melakukan usaha kerajinan tangan berupa oleh-oleh untuk wisatawan, meskipun begitu pelayanan yang diberikan oleh masyarakat dapat dikatakan baik dalam melayani pengunjung sehingga apresiasi masyarakat dapat diberikan perhatian khusus. Penyediaan souvenir untuk pengunjung tidak dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu, dibutuhkan pemberdayaan yang bertahap

agar masyarakat Gili Labak mampu untuk menciptakan produk lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan wisata dapat dikatakan cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan yang dilakukan dalam menjaga lingkungan wisata tetap baik tanpa adanya pencemaran lingkungan. Timbulnya rasa kepunyaan terhadap wisata Gili Labak baik untuk pemeliharaan lingkungan Pulau Gili Labak. Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Antisipasi dalam pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh kebijakan adalah untuk pengerahan dana masyarakat atau yang sering disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat lain dan memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat. Setiap orang akan melakukan aktivitas yang tidak merugikan misalnya, membuang sampah sembarang, justru masalah sampah harus dikelola dengan baik melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga berkesinambungan pembangunan dan

pengembangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Nurhidayati (2018) sebagaimana yang dikutip oleh Hadiwijoyo (2012:82) mendefinisikan pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk mendukung terjadinya perkembangan khususnya perkembangan wisata. Dalam teori yang diungkapkan oleh Nurhidayati menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan wisata, hal ini berarti masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan memang pada dasarnya masyarakat dilibatkan dalam acara kunjungan wisata dari mancanegara dengan menyediakan makanan dan minuman dari khas pulau Gili Labak sehingga dengan pelibatan ini Pemerintah menganggap masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus berperan aktif dalam pengembangan wisata yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Menurut Nurhidayati (2008) pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat dengan mendefinisikan sebagai berikut Pertama, bentuk pengembangan khususnya pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan yang akan dilakukan. Kedua, memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata. Ketiga, menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dengan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung. Dalam hal ini masyarakat bukan hanya merasakan dampak negatifnya saja seperti dampak kerusakan lingkungan dan sebagainya akan tetapi masyarakat juga ikut merasakan manfaat dalam pembangunan wisata ini dengan dibangunnya warung-warung yang dapat menambah keuangan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam model ini masyarakat bukan lagi sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Model pengembangan ini sangat sesuai dengan karakter atau jenis obyek dan daya tarik wisata yang bertumpu pada sumberdaya wisata yang berhubungan langsung dengan masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan

Peran Triple Helix (Pemerintah, swasta dan Masyarakat) dalam pengembangan wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep belum terjalin kerjasama antar aktor pembangunan dan pengembangan wisata seperti antara pemerintah dan swasta yang berjalan masing-masing dalam pengembangan wisata, meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan akan tetapi dibutuhkan pembangunan yang bertahap dan konsisten serta dibutuhkannya kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antar aktor pembangunan wisata sehingga pembangunan wisata akan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dalam mengembangkan wisata Gili Labak masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya evaluasi dan keberlangsungan tahapan pengembangan berikutnya. Pemerintah masih belum berkomitmen dalam menjadikan wisata Gili Labak menjadi wisata unggul, ketidakkomitmenan ini dapat dilihat dari setelah berakhirnya Program Visit 2018 berakhir maka berakhir pula pengembangan wisata tersebut.
2. Peran Swasta dalam pengembangan wisata hanya dapat dilihat dari segi promosi tanpa adanya dukungan yang

nyata berupa investasi terhadap pembangunan wisata. Biro perjalanan, restoran, hotel dan sebagainya masih belum mampu bekerjasama dengan pemerintah sehingga koordinasi dalam menyediakan fasilitas dan kebutuhan yang disediakan oleh swasta tidak berjalan dengan semestinya.

3. Peran masyarakat dalam menyediakan pelayanan dan kebutuhan pengunjung wisata Gili Labak cukup maksimal dengan menyediakan penginapan, makanan minuman, pemeliharaan tempat wisata, hanya saja masyarakat masih belum mampu untuk memberikan souvenir yang dapat dijadikan oleh-oleh untuk pengunjung wisata Gili Labak.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan masukan atau rujukan bagi upaya penguatan Peran Triple Helix (Pemerintah, swasta dan Masyarakat) dalam pengembangan wisata Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep. Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran pemerintah dalam hal evaluasi program perlu dilakukan sehingga dengan evaluasi ini maka akan ada rencana

selanjutnya mengenai pembangunan dan pengembangan wisata yang dilakukan.

- 2) Keterlibatan swasta dalam investasi dan penyediaan fasilitas pendukung untuk pengembangan wisata diperlukan partisipasi sehingga tidak selalu bertumpu pada Pemerintah.
- 3) Masyarakat secara mandiri mampu untuk menghasilkan produk lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta. Rineka Cipta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Pitana, dan Diarta, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Rosita, Risma. 2017. *Upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap Wisatawan (Studi Kasus : Pulau Gili Labak , Kabupaten Sumenep Madura*. Diakses pada tanggal 31 Juli 2018).
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta



Sulistiyani, Ambar Teguh, 2017. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.

Yoeti, Oka A, 2016. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka.